

# MANAJEMEN DAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN ISLAM

Nurasa

Mahasiswa Pascasarjana (S3) IAIN Imam Bonjol Padang  
Konsentrasi Pendidikan Islam, Jln. Jenderal Sudirman Padang, e-mail: nurasa\_darun@yahoo.co.id



**Abstract: Management and Environmental Islamic Education.** Proceed from the assumption that life is education and education is life in the sense of education as a matter of life and living, the discourse about education is one topic that is always interesting. There are at least two reasons can be identified so as to keep up to date education to be studied. First, the need for education is crucial because it is intrinsically linked directly to the realm of life and human life. To discuss education means talking human needs. Second, education is also a strategic vehicle for efforts to improve the quality of human life, which is characterized by increased levels of well-being, poverty and decreasing the volume of the opening of the various alternative options and opportunities to actualize themselves in the future. In realizing that there are three factors that need attention, namely parents factors, school factors, and environmental factors society.

**Kata Kunci :** Manajemen, lingkungan, pendidikan Islam.

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang berusaha meningkatkan kualitas hidup individu atau kelompok masyarakat untuk beranjak dari kualitas kehidupan sebelumnya menuju pada kualitas hidup selanjutnya. Oleh karena itu pemaknaan pemberdayaan masyarakat mempunyai cakupan yang luas seperti aspek pendidikan, ekonomi, politik, maupun sosial kebudayaan.

Pendidikan merupakan perkembangan yang terorganisir dari semua potensi manusia, moral, intelektual, maupun

jasmani. Oleh dan untuk keperibadian individual dan kegunaan masyarakat. Pendidikan Islam merupakan sub sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Perjalanan Pendidikan Islam tidak terlepas dari pasang surutnya sistem Pendidikan Nasional itu sendiri, sebagaimana tidak terlepasnya umat Islam ketika kita membicarakan nasib bangsa ini, dan bahkan Pendidikan Islam mempunyai sejarah panjang di Indonesia yang telah ikut mewarnai kehidupan bangsa ini baik masa sebelum penjajahan bahkan setelah Indonesia merdeka.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang nota bene mayoritas masyarakatnya memeluk Agama Islam, seharusnya Pendidikan Islam mendasari pendidikan-pendidikan lainnya, serta menjadi primadona bagi peserta didik, orang tua, maupun masyarakat. Demikian juga halnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan seharusnya Pendidikan Islam dijadikan tolok ukur dalam membentuk watak dan pribadi peserta didik, serta membangun moral bangsa (*Nation Character Bulding*). ( Abdul Majid, 2004:161).

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, maupun para pakar pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan tak terkecuali pendidikan Islam sudah sejak lama, namun hasil yang dicapai belumlah maksimal. Saat ini terdapat ketidakseimbangan antara *idealitas* dengan *realitas yang ada*. Upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan masih bersifat persial, terkotak-kotak, dan tidak komprehensif. Sehingga wajar apabila out-put kurang memberikan hasil yang maksimal baik terhadap peserta didik, orang tua, maupun masyarakat. Kita merasakan dan mengetahui bahwa pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini dinilai hanya mampu memenuhi aspek normatif semata dan tidak atau belum sanggup mewujudkan apa yang selama ini diharapkan. Dengan kata lain, pendidikan Islam juga memiliki kelemahan-kelemahan prinsipil untuk bisa berperan secara pasti dalam memberdayakan komunitas muslim di negeri ini. Untuk itu seharusnya lembaga

Pendidikan Islam memerlukan adanya perencanaan strategis, dengan menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, metode, program, dan kegiatan yang matang. Hal ini dimaksudkan sebagai perencanaan jangka panjang untuk menjawab tantangan eksternal yang semakin dinamis dan kompleks. Disinilah diperlukan analisis kekuatan, kelemahan (*faktor internal*), peluang serta ancaman (*faktor eksternal*). Akhirnya akan diketahui dimana posisi sekolah, mau kemana sekolah, dan apa masalah krusial yang dihadapi, lalu dibuat perencanaan strategis menjangkau masa depan yang lebih baik. (Syafaruddin, 2005 : 131).

Proses seperti ini perlu melibatkan sejumlah orang yang tak kalah pentingnya dalam ikut mensukseskan Pendidikan Islam. Upaya mengikutsertakan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan, inilah yang dimaksud penulis dengan istilah “memberdayakan masyarakat”. Keberhasilan pendidikan bukan saja menjadi tugas dan tanggung jawab institusi pendidikan saja, tetapi yang amat penting adalah bagaimana masyarakat dapat memberikan respons positif terhadap perkembangan pendidikan yang ada saat ini, karena out-put pendidikan pada akhirnya akan bermuara pada suatu titik yaitu masyarakat.

Dalam sejarah bangsa Indonesia yang harus digaris bawahi terlebih dulu adalah,

*pertama*, komunitas muslim merupakan kelompok masyarakat yang jumlahnya sangat besar, bahkan terbesar di dunia yang terkonsentrasi dalam satu negara. *Kedua*, ajaran islam menyatakan bahwa manusia, disamping harus berilmu pengetahuan juga harus beriman dan bertaqwa pada Allah SWT.

Untuk memahami aspek pertama, maka dengan jelas dapat dimengerti bahwa jumlahnya yang sangat besar (komunitas muslim), telah melahirkan berbagai potensi dalam langkah optimalisasi pemberdayaan masyarakat umat Islam di negeri ini. Sebab, jika dunia Pendidikan Islam mampu menggali dan memenej sumber daya manusia (SDM) yang ada pada komunitas muslim dalam peningkatan mutu pendidikan sungguh akan memberikan nilai maksimal yang dicapai oleh institusi pendidikan Islam. Adapun pemberdayaan masyarakat pada komunitas muslim ada pada komite sekolah atau majlis sekolah, konsultan sekolah, cendikiawan muslim, tokoh-tokoh agama yang mempunyai komitmen pada ajaran Islam. Tokoh-tokoh masyarakat yang tertarik dan peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan, dan lain-lainnya. Sedangkan yang kedua adalah, menjadi dasar pemikiran penting selanjutnya, tentang masih perlunya pemikiran peroses pemberdayaan masyarakat yang terencana, matang, oleh umat islam terhadap umat Islam itu sendiri. Sebab pendidikan Islam pada umumnya belum bisa dinilai telah ikut serta secara memadai dalam menanamkan atau memberdayakan

masyarakat dengan nilai-nilai moral agama. Ini tampak menjadi sebuah kegelisahan sosial, karena peroses yang berlangsung sangat didominasi oleh peroses pemberdayaan secara intelektual. Institusi pendidikan yang banyak menggunakan masyarakat sebagai sumber pelajaran memberi kesempatan yang luas untuk mengenal kehidupan masyarakat yang sebenarnya. (Nasution, 2004:153).

Selama ini muncul beberapa pendapat yang mengkritisi perproses Pendidikan Islam di sekolah anataralain: (1) hasil blajar PAI belum sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan Islam itu sendiri, (2) Pendidikan Nasional belum sepenuhnya mampu mengembangkan manusia Indonesia yang relegius, berakhlak mulia, berwatak kesatria, dan patriotik, (3) kegagalan pendidikan Islam disebabkan pembelajarannya lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formal dan hafalan, bukan pada pemaknaannya, (4) Pendidikan Islam lebih menekankan pada kemampuan verbalisme dan kemampuan numerik (menghitung), sementara kemampuan mengendalikan diri dan penanaman keimanan diabaikan, (5) penyampaian materi akhlak di sekolah sebatas tiori, padahal yang diperlukan adalah suasana keagamaan, dan (6) permasalahan Pendidikan Islam di sekolah sa'at ini mengalami masalah metodologi. (Abdul Majid:165)

Terhadap realita demikian ada beberapa faktor yang perlu dianalisis dan segera mendapat perhatian dari semua pihak.

Menurut penulis bahwa keberhasilan pendidikan Islam sangat memiliki ketergantungan yang sangat tinggi yang dipengaruhi oleh adanya peroses kerjasama yang erat antara institusi Pendidikan dengan masyarakat. Masyarakat pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang apabila kita berdayakan (Piaget dalam bukunya Sund, 1976). Menurut Djohar kemampuan operasi berpikir manusia ditentukan oleh dua komponen, pertama kemampuannya menangkap gejala, kedua kemampuannya untuk mengkonsepsikan gejala itu menjadi suatu pengertian umum, (Djohar, 2003 :133-134).

Untuk pemberdayaan potensi masyarakat dapat diklasifikasikan pada tiga arah, yaitu:

- a. Harus dimulai dari pemberdayaan pendidikan keluarga. Konsep “Brain development” menjelaskan bahwa sistem penerapan otak manusia sangat ditentukan oleh kontak manusia pada tiga tahun pertama kehidupannya di bumi. Semakin banyak gejala alam yang dapat ditangkap anak pada tiga tahun pertama usia mereka, maka akan merangsang pertumbuhan sistem serabut-serabut otak, yang berarti akan berdampak tingginya kecerdasan anak dimasa mendatang. Oleh karena itu pemberdayaan potensi umat harus dilakukan sejak awal kelahiran. Selain itu orang tua harus bertanggung jawab terhadap perilaku gizi yang proposional, dan juga mengkondisikan agar anak

mengalami proses perkembangan secara proporsional.

- b. Institusi pendidikan merupakan arah pemberdayaan potensi masyarakat yang selanjutnya setelah keluarga. Menjadi tanggung jawab pihak sekolah dalam hal pertumbuhan anak selanjutnya, baik fisik, kecerdasan, intelektual, kreativitas, dan perkembangan kecerdasan emosional, bahkan tumbuhnya kecerdasan spritual secara optimal. Pada hal lembaga pendidikan kita belum maksimal melakukan tugas ini. Untuk itulah sudah saatnya institusi pendidikan melakukan berbagai upaya inovasi dengan landasan bahwa pemberdayaan potensi masyarakat perlu memperkecil peran tumbuhnya cara berfikir linier (yang masih menjadi tekanan pendidikan sekarang). Mengapa demikian, karena sesungguhnya bumi dan segala isinya selalu mengalami perubahan-perubahan yang begitu cepat dan selalu tidak linier, begitu juga hendaknya konsep Pendidikan Islam. Agar maksud ini bisa dicapai maka kemampuan keterampilan dan seni harus menjadi bagian integral dari kurikulum Pendidikan Islam. (*Ibid* : 134-135)
- c. Kurikulum di sekolah harus mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan di masyarakat. Dengan demikian peserta didik akan lebih memahami kondisi masyarakat. Sekolah janganlah terisolasi dari masyarakat, apa yang

dipelajari di sekolah hendaknya berguna bagi kehidupan peserta didik dalam masyarakat dan didasarkan atas masalah masyarakat. Dengan demikian peserta didik akan lebih serasi dipersiapkan sebagai warga masyarakat. (Nasution, 2004 :154).

Perkembangan potensi masyarakat dalam salah satu bentuk kerjasama penerapan pembelajaran Pendidikan Islam dengan cara sebagai berikut: (1) melibatkan orang tua murid secara intens dalam berbagai kegiatan sekolah, (2) Kurikulum jangan hanya milik sekolah saja, akan tetapi harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan harus melibatkan masyarakat, (3) Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberikan kontrol terhadap perkembangan kurikulum di sekolah, jadi sekolah jangan bersifat otoritar, (4) pihak sekolah harus membuat jadwal pertemuan dengan masyarakat secara berkala dan mengevaluasi dari segala kegiatan yang telah dilakukan sekolah, (5) membangun iklim sekolah yang efektif dan kondusif, terbuka, ramah pada masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki, artinya sekolah tidak berjarak dengan masyarakat.

## PEMBAHASAN

Menurut Abudin Nata. Dapat dijumpai sekurang-kurangnya delapan penyakit yang menimpa masyarakat modern, *Pertama*, desintergarsi antara ilmu pengetahuan

(spesialisasi yang kaku), yang berakibat terjadinya pengkotak-kontakan akan fikran manusia dan cenderung membingungkan masyarakat. *Kedua*, keperibadian yang terpecah (*split personality*) sebagai akibat dari kehidupan yang dipolakan oleh ilmu pengetahuan yang terlampaui terspesialisasi dan tidak berwatak nilai-nilai ketuhanan. *Ketiga*, dangkalnya rasa keimanan, ketakwaan, serta kemanusiaan, akibat kehidupan yang terlampaui rasionalistik, dan individualistik. *Keempat*, timbulnya pola hubungan yang materialistik sebagai akibat dari kehidupan yang mengejar duniawi yang berlebihan. *Kelima*, cenderung menghalalkan segala cara, sebagai akibat dari paham hedonisme yang melanda kehidupan. *Keenam*, mudah stres dan frustrasi, sebagai akibat dari terlampaui percaya dan bangga terhadap kemampuan diri. *Ketujuh*, perasaan terasing di tengah-tengah keramaian (*lonely*) sebagai sifat individualistik, dan *kedelapan*, kehilangan harga diri dari masa depannya, sebagai akibat dari perbuatan yang menyimpang. (Abuddin Nata, 2003 :82)

Berkenaan dengan hal-hal yang di atas peran pengelola Pendidikan Islam harus menyadari terhadap ancaman ini. Orientasi Pendidikan Islam yang sejak awal tidak semata-mata menekankan pada pengisian otak, tetapi juga pengisian jiwa, pembinaan akhlak, dan kepatuhan dalam menjalankan ibadah tidak boleh bergeser. Visi pendidikan Islam harus mengintegrasikan berbagai pengetahuan yang terkotak-kotak ke dalam

ikatan tauhid, dan juga harus mampu memberikan filter dan arahan dalam penyerapan ilmu pengetahuan yang tidak sesuai dengan kaidah Islam.

Strategi Pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan adalah, setiap lembaga pendidikan Islam harus mampu mengakses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pendidikan Islam tidak boleh mengasingkan diri dari realitas kehidupan yang senantiasa berkembang dan terus berubah sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Maka dalam kerangka ini dituntut adanya strategi dan taktik dalam mengelola pendidikan Islam. Strategi ini mutlak harus disiapkan agar Pendidikan Islam tidak terlibas oleh hegemoni perubahan itu sendiri. Salah satu bentuknya adalah dengan menterjemahkan konsep ajaran itu kedalam perubahan-perubahan yang terjadi. Ajaran islam tidak harus bertahan dengan metodolgi lama yang mungkin sangat cocok dizamannya, namun sekarang komunitas yang akan menerimanya pun juga telah berubah pula, jadi pendidikan Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan demikian metodologi Pendidikan Islam tidak terasa hambar dan membosankan.

Fasli Jalal dan Dedi Supriadi mengemukakan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya konsep pendidikan yang berbasiskan masyarakat, yaitu: (a) Keterbatas sekolah reguler, hal ini terasa ketika pemerintah mencanangkan wajar

9 tahun. (b) Keragaman budaya, dimana terjadinya penguatan nilai-nilai budaya dan nilai lokal yang sangat diperlukan, maka kontrol masyarakat sangat dibutuhkan. (c) Keterbatasan anggaran pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemda dan masyarakat sangat diperlukan demi terlaksananya proses pendidikan.

Tujuan pendidikan yang berbasis masyarakat adalah untuk meningkatkan kedinamisan masyarakat dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan peserta didik dan masyarakat itu sendiri. Maka sekolah dan pemerintah harus mampu menjadikan dirinya sebagai pelayan masyarakat.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa suatu program atau usaha yang dicanangkan pemerintah seperti pendidikan berbasis masyarakat, adalah merupakan suatu implementasi dari ajaran Islam itu sendiri, yang mewajibkan seluruh umatnya untuk selalu menuntut ilmu pengetahuan. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak bisa berjalan sepihak saja, namun harus bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Sekolah sebagai penghasil produk dan masyarakat sebagai pengguna produk semestinya harus berintegrasi. Keberhasilan dari sebuah lembaga pendidikan mau tidak mau harus melibatkan tiga unsur, yakni peran orang tua dirumah, peran guru di sekolah, dan peran masyarakat dilingkungan. Ketiga faktor ini yang selama ini belum bersinergi secara maksimal, makanya untuk masa

depan Manajemen sekolah yang berbasis masyarakat sudah merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindarkan. Hal ini bertujuan agar: (a) terpeliharanya kelangsungan hidup sekolah. (b) meningkatkan mutu pendidikan. (c) memperlancar kegiatan PBM. (d) memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program sekolah. (e) memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (f) meningkatkan peran sekolah dalam memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. (g) menjamin kelangsungan mutu sekolah. (h) menimbulkan dan meningkatkan keterampilan masyarakat dimana sekolah itu berdiri.

Untuk mengimplementasikan program-program sekolah berbasis masyarakat ini, konsep Komite Sekolah telah digulirkan oleh pemerintah Cq. Kementerian pendidikan Nasional sejak tahun 2002 sesuai dengan Kepmendiknas No.044/U/2002. Salah satu landasan hukum yang melahirkan Kepmendiknas tersebut adalah UU Nomor: 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional. Pada Bab VII antarlain mengamanatkan, bahwa untuk melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan perlu dibentuk ”dewan sekolah” di setiap kabupaten/kota, yang kemudian lebih dikenal dengan nama generik ”dewan pendidikan”. Kemudian di setiap satuan pendidikan dibentuk ”komite sekolah/ Madrasah”.

Berdasarkan lampiran nomor II dalam Keputusan Mendiknas No.044/U/2002, komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan dalam satuan pendidikan, baik pra –sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur luar sekolah. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali murid peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh-tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, (PP No. 17 tahun 2010).

Dalam pasal 188 (2) PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan peran serta masyarakat telah dirumuskan sebagai berikut: Masyarakat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karena itu masyarakat mempunyai peran dalam bentuk (a) penyediaan sumber daya pendidikan, (b) penyelenggaraan satuan pendidikan, (c) penggunaan hasil pendidikan, (d) pengawasan penyelenggaraan pendidikan, (e) pengawasan pengelolaan pendidikan, (f) pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya, (g) pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan /atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

Pada pasal 188 (1) PP Nomor 17 tahun 2010 menjelaskan ”peran serta masyarakat meliputi peran serta perorangan, kelompok,

keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Dari pran Komite sekolah ini tercermin begitu besarnya peran serta masyarakat dalam memajukan lembaga pendidikan. Tetapi amat disayangkan hal itu baru sebatas normatif atau konsep-konsep para pemikir pendidikan, akan tetapi kenyataannya di lapangan belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antaralain, beragamnya tingkat sosial masyarakat, beragamnya tingkat pendidikan masyarakat, beragamnya tingkat ekonomi masyarakat, masih kentalnya konsep pengelola pendidikan di zaman Orde Baru, yang seakan-akan sekolah berada pada posisi menara gading, dan masyarakat berada pada tataran akar rumput. Hal itu terasa betapa sulitnya masyarakat memberikan akses ke sekolah, tidak saja dalam memberikan kritik dan masukan, akan tetapi dalam memintakan penjelasan dari perkembangan siswa saja sulit. Hal itu yang masih terjadi ditengah-tengah masyarakat, sehingga menerapkan konsep Komite sekolah tadi masih terasa berjalan ditempat.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sosialisasi yang kontiniu pada masyarakat tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan satuan pendidikan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah pihak pengelola pendidikan harus selalu membuka diri terhadap masyarakat. Sebenarnya konsep ini sudah berjalan dulu dikalangan pendidikan Islam, seperti contoh lembaga pondok

pesantren, dimana sumber pendanaannya dari donatur masyarakat, setiap ada perkembangan baru selalu dimusyawarahkan dengan masyarakat. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki akan lembaga pendidikan tersebut. Itulah barangkali sebabnya keberadaan pondok pesantren mampu bertahan sepanjang zaman. Nilai-nilai seperti inilah yang semakin hilang hari ini, pada hal konsep yang diterapkan di pondok pesantren dulu kala tersebut sangat cocok dengan konsep pendidikan itu sendiri. Akan tetapi oleh karena terimbas oleh perkembangan zaman yang katanya zaman modern sehingga pengelola terbawa arus kearah yang kurang tepat dalam mempertahankan konsep pendidikan yang berbasis kemasyarakatan itu.

Ide Islamisasi ilmu pengetahuan atau lebih tepatnya Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer lahir dan berangkat dari premis bahwa ilmu pengetahuan kontemporer tidak bebas nilai dan tidak universal. Prof. M.Naquib Al-Attas yang selama ini penggagas konsep Islamisasi Ilmu pengetahuan sebelum gagasan ini dipopulerkan oleh Ismail al-Faruqi, menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan modern sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan keagamaan, kebudayaan, dan filsafat yang mencerminkan kesadaran dan pengalaman Barat. (Wan Mohd. Nor Wan Daud, *Islamisasi Ilmu Ekonomi, Apa yang salah*, Jurnal Islamia 2005). Jadi lembaga pendidikan Islam harus mampu memberikan nilai-nilai tauhid atau nilai-nilai Islamiyah terhadap



lingkungan masyarakat yang sekaligus melibatkan masyarakat itu sendiri dalam pengelolaannya.

Apabila diamati, maka sistem manajemen pendidikan yang berbasis masyarakat sangatlah dipentingkan dalam dan untuk meningkatkan serta menyongsong masa depan yang lebih baik (*Community Based Education*). Pendidikan yang berbasiskan masyarakat mengindikasikan kepemilikan masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Islam telah menganjurkan umatnya agar selalu menghubungkan dirinya dengan Allah ( *Hablum minallah*) dan menghubungkan dirinya dengan sesama manusia dan alam sekitarnya (*Hablum minannas*). Firman Allah ini artinya adalah bahwa setiap lembaga pendidikan tidak boleh berdiri sendiri harus berhubungan dengan masyarakat. Sesuatu yang memisahkan diri dengan alam sekitarnya, maka alam sekitar itu akan menjadi lawan baginya. Dengan demikian akan terjadi suatu kompetisi yang tidak sehat antara lembaga pendidikan dengan lingkungan masyarakat. Disinilah kita lihat betapa maraknya hari ini masyarakat tega-tega dan malah berani menyerang dan merusak lembaga pendidikan. Dengan demikian lembaga pendidikan tidak merupakan milik masyarakat lagi. Jika hal ini berlansung terus menerus dapat diramalkan misi dan tujuan pendidikan tidak akan tercapai bahkan dapat dikatakan gagal total. Jadi konsep manajemen pendidikan berbasis lingkungan mutlak diperlukan hari ini termasuk bagi lembaga pendidikan Islam.

## PENUTUP

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Lembaga pendidikan islam merupakan sub sistem dari pendidikan nasional, dan bertanggung jawab penuh dalam mencerdaskan kedua bangsa.
- b. Lembaga pendidikan termasuk pendidikan Islam bukanlah lembaga yang harus berdiri sendiri, akan tetapi harus menyatu dengan masyarakat.
- c. Dalam pendidikan ada tiga komponen penting yaitu, orang tua, lembaga pendidikan/guru, dan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan:

- a. Pendidikan Islam diharapkan menata visi, misi, dan tujuannya dengan melibatkan masyarakat.
- b. Tujuan pendidikan Islam jangan terlepas dari tujuan kehidupan manusia itu sendiri, yakni menghambakan diri pada Allah dan menjalankan fungsi sebagai khalifah di bumi.
- c. Pendidikan Islam diharapkan mampu mengadopsi perkembangan sosial yang terjadi.

## KEPUSTAKAAN ACUAN

- Asnawir, *Adminstrasi pendidikan*, Padang, IAIN Press, 2003
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Adminstrasi Pendidikan*, Padang, IAIN Press, 2005

- Abuddin Nata, Prof. DR. *Sejarah pendidikan Islam*, Jakarta, 2011
- Nasution, S. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004
- Hasan, Tholha, Muhammad, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta, Lantabora Press, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, Jakarta. Lantabora Press, 2005
- Djohar, *Pendidikan Strategi Alternatif Untuk Masa Depan*, Yogyakarta, Lesfi, 2003
- Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Islam*, Jakarta Galiza, 2003
- Majid Abdul (dkk), *pendidikan agama islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005
- Hasan, Fuad, *dasar Kependidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Syarifuddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta, Ciputat Press, 2005
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan pendidikan*, Jakarta, Rajawali Press, 2006
- Panjastuti, Sri Renani, dkk, *Komite Sekolah, Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta, Hiokayat Publishing, 2000.
- Tilaar. HAR, *Paradigma Baru pendidikan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- Armida S. Alisjahbana, *manajemen Otonomi Daerah, Implementasi Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pusat-daerah*, (Makalah), disampaikan pada Seminar nasional “ Solusi dan evaluasi Kritis Masa Depa Ekonomi Indonesia”, diselenggarakan oleh Jurusan ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung 20 Juli 1999.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002, tanggal 2 April 2002 tentang Dewan pendidikan dan Komite Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan.